

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN  
JAKSA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM  
PRESPEKSTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* MUHAMMAD  
ṬAHIR IBNU 'ASHUR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Mia Miftakhur Rohmah**

**NIM : C03217019**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Miftakhur Rohmah  
NIM : C03217019  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Publik Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : “KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PERATURAN JAKSA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEPENTINGAN HUKUM PRESPEKTIF *MAQĀSID*  
*AL-SHARĪ’AH* MUHAMMAD ṬAHIR IBNU ‘ASHUR”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2021

Saya yang menyatakan

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp is yellow and red, with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "FSC6BAHF820568895" in the middle, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. The signature is in black ink.

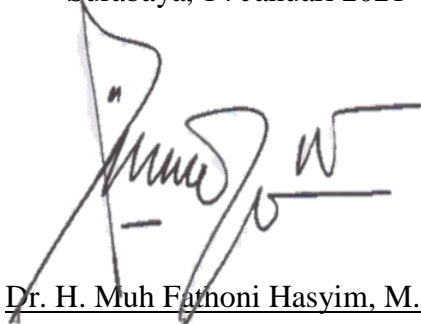
Mia Miftakhur Rohmah

NIM. C03217019

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mia Miftakhur Rohmah NIM. C03217019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Januari 2021

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Muh Fathoni Hasyim', written over a horizontal line.

Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M. Ag

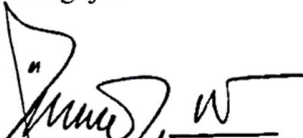
NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN

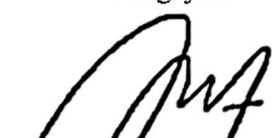
Skripsi yang ditulis oleh Mia Miftakhur Rohmah NIM. C03217019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

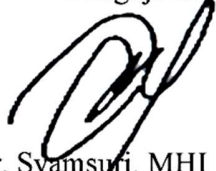
Penguji I

  
Dr. H. Muh Fakhoni Hasyim, M.Ag  
NIP. 195601104987031001

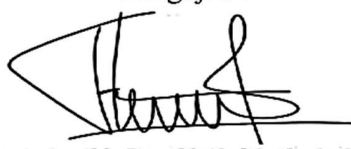
Penguji II

  
Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., M.Si  
NIP. 197208062014112001

Penguji III

  
Dr. Syamsuri, MHI  
NIP. 197210292005011004

Penguji IV

  
Muhammad Jazil Rifqi, MH  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 04 Februari 2021

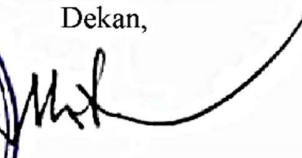
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988030003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mia Miftakhur Rohmah  
NIM : C03217019  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [miamifta452@gmail.com](mailto:miamifta452@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15  
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEPENTINGAN HUKUM PRESPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪAH*  
MUHAMMAD TAHIR IBNU 'ASHUR**

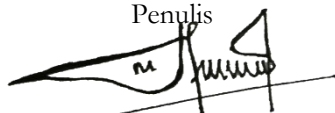
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2021

Penulis

  
(MIA MIFTAKHUR ROHMAH)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif *Maqāsid Al-Sharī’ah* Muhammad Tāhir Ibnu ‘Ashūr”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum. *Kedua*, Bagaimana Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif *Maqāsid Al-Sharī’ah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian dari berbagai aspek dokumen pada kualitas dari norma hukum itu sendiri maupun kekuatan mengikat suatu undang-undang, filosofi, teori, perbandingan, maupun struktur, dibandingkan dengan banyaknya data, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni menyimpulkan dari hal yang bersifat umum menjadi variable yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* dalam Peraturan jaksa No.15 Tahun 2020, telah mengusung ide keseimbangan peran dalam penanggulangan tindak pidana tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana dalam konsep *Restorative Justice* ini memberikan keadilan yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dan juga dalam konsep ini menyediakan kesempatan bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, dan untuk pelaku tindak pidana agar memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggung jawab dengan cara yang berarti, dalam masyarakat supaya juga memahami sebab utama terjadinya kejahatan demi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (*mutual agreement encouraged*). Negara Islam yang menghadapi berbagai masalah hukum dan etnis khususnya di Negara Indonesia sangat membutuhkan konsep Perdamaian. Dalam penelitian ini melihat makna konsep Perdamaian (*Restorative justice*) selaras dengan teori *Maqāsid Al-Sharī'ah*, dimana *Maqāsid Al-Sharī'ah* ini hadir dengan tujuan untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Selaras dengan kesimpulan di atas maka disarankan; *Pertama*, agar pihak penegak hukum diharapkan memaksimalkan konsep *Restorative Justice* ini, karena konsep ini dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. *Kedua*, hendaknya pihak penegak hukum berlaku adil bagi masyarakat dan tidak memihak siapapun kecuali dengan keadilan dan kebenaran.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15

<b>BAB II KONSEP <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i> DALAM PERSPEKTIF</b>		
<b>MUHAMMAD TAHIR IBNU 'ASYUR</b> .....	17	
A. Biografi Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur .....	17	
B. Karir Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur .....	18	
C. <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i> .....	20	
D. Dimensi-dimensi <i>Maqāsid</i> .....	23	
E. Kontruksi <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i> Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur .....	25	
<b>BAB III <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PERATURAN JAKSA NO.15</b>		
<b>TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN</b>		
<b>BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM</b> .....	35	
A. <i>Restorative Justice</i> .....	35	
B. Perwujudan Supremasi Hukum Melalui <i>Restorative Justice</i> .....	40	
C. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	42	
D. Model-model Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	45	
E. Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020.....	48	
<b>BAB IV TINJAUAN <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP KONSEP</b>		
<b><i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PERATURAN JAKSA NO.15</b>		
<b>TAHUN 2020</b> .....	56	
A. Analisis <i>Restorative Justice</i> dalam Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020.....	56	
B. Analisis <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i> Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur Terhadap Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Peraturan jaksa No.15 Tahun 2020 .....	59	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		65
A. Kesimpulan .....		65
B. Saran.....		66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		67
Buku .....		67





# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hubungan sosial menciptakan sebuah pilihan yaitu harmoni dan juga konflik. Harmoni terbangun apabila setiap orang berusaha saling memahami dan juga mengutamakan toleransi, tidak saling menyalahkan, dengan begitu akan tercipta sebuah hubungan yang penuh kedamaian. Perbenturan kepentingan juga arogansi adalah awal yang menimbulkan dan melahirkan serta berkembangnya suatu konflik. Bisa kita ketahui bahwa semua agama tidak menganjurkan sebuah pertengkaran, penindasan, ataupun penyiksaan.

Hukum mengatur setiap pergaulan hidup manusia dan tingkah laku secara damai, karena hukum juga mengehendaki perdamaian. Hukum melindungi kepentingan serta perdamaian manusia, hukum tidak hanya mewujudkan ketertiban, namun hukum harus memberi keadilan bagi masyarakat. Untuk tercapainya keadilan hukum harus berdiri tegak, dimana suatu sistem penegakan hukum harus memiliki sebuah nilai yang baik dalam hal menyangkut nilai kaidah serta tindakan manusia secara nyata. Menjamin kehidupan sosial manusia merupakan hakikat hukum, karena hukum dan masyarakat merupakan sebuah intelerasi.

Tujuan hukum yakni mengatur kehidupan manusia, yang dikehendaki hukum yakni perdamaian. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah prolog dari hukum rakyat yakni “*Franka Salis*” beliau mengucapkan damai di antara sesama harus dipertahankan oleh hukum dimana harus dilindungi kepentingan-kepentingan masyarakat itu, kehormatan, kemerdekaan, dsb terhadap sesuatu yang bisa merusaknya. Baik untuk keperluan individu maupun kepentingan dari kelompok manusia yang selalu bertolak satu sama lain. Keperluan ini akan



1. Mengusahakan sebuah perdamaian yang nantinya dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan pelaksana tindak pidana terhadap korban tindak pidana serta juga pihak terkait.
2. Memberi kesempatan pada pelaksana/pelaku tindak pidana agar bertanggung jawab dan juga membayar kekhilafannya, upaya membayar kerugian akibat tindak pidana yang dilaksanakan dengan persetujuan para pihak.
3. Menuntaskan sebuah problem hukum pidana yang ada antara pelaksana/pelaku tindak pidana dengan sasaran/korban tindak pidana yang bertujuan agar teraihnya sebuah kesepakatan diantara para pihak tanpa ada paksaan, dan tanpa merugikan salah satunya.

Akhirnya bisa di definisikan konsep *Restorative Justice* ialah sebuah penyelesaian problem/masalah pidana yang dijalankan diluar pengadilan tujuannya untuk *me-restore* (membaiki kembali) dalam keadaan semula, yaitu melibatkan pelaku, korban, juga pihak tetaut, menebus kesalahan pelaku yakni memberikan segala kerugian yang dialami oleh korban kejahatan dengan

Beragam usaha yang diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk melebarkan penerapan konsep *Restorative justice*/Keadilan Restoratif disini tidak dibatasi sekedar perkara pidana yang pelaksananya anak belum cukup umur saja , akan tetapi Kepolisian RI melalui PERKAP no.6 tahun 2019 juga mengeluarkan suatu pemberlakuan rancangan keadilan restoratif untuk menutup perkara pidana di masa renyidikan sewaktu SPDP (Surat Pemberitahuan Pada dimulainya penyidikan) ataupun belum dikirimnya ke Jaksa Penuntut Umum oleh aspek kepolisian.

[illegible]

Menurut Syamsul Anwar, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan tentang istilah perdamaian yang banyak memunculkan penilaian mendasar agama Islam sebagai penilaian mendasar hukum Islam pula. Contohnya bisa ditelaah dalam hal tauhid, tak terikat/bebas, kebermanfaatan, persatuan, keadilan, persamaan, pesan, keutamaan/fadilah, tasamuh, ta'awun serta juga lainnya.<sup>2</sup>

Dalam ranah hukum pidana Islam perdamaian disebut *Ishlah*. *Ishlah* dalam penyidikan hukum pidana Islam adalah membenahi, menampung, serta memecah perdebatan, yang mempunyai sebuah tujuan untuk menciptakan perdamaian, menciptakan rasa harmonis, serta juga menganjurkan seseorang supaya saling berdamai, bertindak secara baik, berperilaku secara suci. Jadi

4 M. Amin Abdullah, "Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan" Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 3 Nomor 2, 2009, 3.

Q.S al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud no 4919.<sup>5</sup> Yang artinya: Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, *“Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, solat, dan sedekah?”* Para sahabat berkata, *“Ya, wahai Rasulullah.”* Rasulullah bersabda, *mendamaikan orang yang berselisih, rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas agama.*

Dalam pandangan fiqih tentang perdamaian tidak jauh dari persoalan maslahat serta *Maqāsid Al-Sharī'ah*, karena semua yang berhubungan dengan suatu permasalahan tidak akan luput dalam hal menggunakan analisis maslahat. Maslahat juga dapat merekonsiliasikan kesenjangan yang ada pada beberapa sumber hukum, dalam kenyataan sekarang serta juga dalam perkembangan zaman yang semakin lama semakin berkembang.

Hal penting yang mendasari inti Agama Islam yakni konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* dimana dalam konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir demi

[illegible]



Inti para ulama memberikan sebuah sketsa mengenai konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah* yakni bahwa *Maqāsid Al-Sharī'ah* wajib berfokus serta berlandaskan dalam lima inti kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan pada tiap tingkatan memiliki sebuah kategori, yakni pokok/primer (*Darūrīyah*), kebutuhan/sekunder (*Hajiyyah*) serta pelengkap/tersier (*Tahsiniyyah*), dalam penetapan hukumnya peringkat *Darūrīyah* menduduki tempat pertama dan *Hajiyyah* mendahului peringkat *Tahsiniyyah*. Apabila diterjemahkan maka urutan tiga menyempurnakan urutan dua serta urutan satu di sempurnakan oleh peringkat dua.<sup>6</sup>

*Darūriyyah* adalah tingkatan sebuah keperluan yang tidak bisa untuk menunda keberadaannya dalam artian yang harus ada, demi menjaga kelengkapan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka dapat mengancam kesejahteraan umat. *Hajiyyah*, tingkatan suatu keadaan yang tidak membahayakan eksistensi kelima pokok, namun apabila tidak terpenuhi hanya akan menimbulkan kesusahan. Sebagai contoh diperbolehkan mengqasar ataupun menjamak bagi musafir. Sementara *Tahsiniyyah* dimaknai sebagai sebuah tingkatan kepentingan yang menjunjung peningkatan kedudukan manusia pada masyarakat serta pada muka Tuhannya, tentunya juga memperdulikan keharusan serta kesesuaian agar kebutuhan mereka mendapat kemudahan, kenyamanan, serta juga kelapangan.

[illegible]



## 1. Identifikasi Masalah

- Hakikat *Maqāsid Al-Sharī'ah* dalam keadilan restorative.
- Restorative justice* dalam hukum Islam.
- Diskripsi “Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020”
- Implementasi “Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020”

Selanjutnya supaya penelitian ini tidak meluas, peneliti akan lebih fokus pada kajian yang akan dibahas, berdasarkan identifikasi masalah antara lain :

- [illegible]

1. Bagaimana Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum?
2. Bagaimana Peraturan Jaksa No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum dalam Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Tāhir Ibn ‘Ashūr?

Dari hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan tidak ada duplikasi ataupun penelitian yang sama dengan apa yang diteliti oleh penulis. Akan tetapi ada sejumlah penelitian yang tertaut pada pokok pemaparan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jurnal research hukum karya Muhaimin pada tahun 2019 judul “*Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan”. Research ini merupakan deskriptif analitis pendekatan utamanya yuridis normative, serangkaian kajiannya adalah penanganan tindak pidana dengan mediasi perantara, disebut pendekatan *restoratif justice*, yaitu melibatkan aspek pemulihan korban beserta keluarganya.
2. Jurnal research hukum penulis Sosiawan pada tahun 2016 judul “*Restorative justice* sebagai wujud perlindungan anak, metode penerapannya

Dua jurnal serta dua skripsi yang usai dipaparkan diatas masing-masing mempunyai kesimpulan pemaparan yaitu : Jurnal karya Muhaimin menjabarkan mengenai penanganan tindak pidana yang bermotif ringan bisa ditempuh dengan jalan *restorative justice*/mediasi, Jurnal karya Sosiawan menjabarkan mengenai Prerspektif *restorative Justice* yang dilaksanakan sebagai perlindungan dari anak yang berurusan dengan hukum, dua skripsi diatas yaitu Ifa Latifah Fitriani, Muhammad Iqbal Farhan yang sama menjabarkan bagaimana peran hukum positif serta hukum islam dalam penegakan hukum menggunakan keadilan *restoratif/restorative justice* yang dijalankan oleh anak. Merujuk kajian pustaka tersebut, walaupun terdapat hal yang sama pada pokok penelitian. Namun penulis mempunyai pemaparan yang beragam/berbeda, yang akan dijabarkan penulis, skripsi ini penulis lebih menekankan pada Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap konsep *restorative justice* dalam “peraturan jaksa no.15 tahun 2020.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan jaksa no.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dalam mewujudkan *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui peraturan jaksa no.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan kepentingan hukum dalam perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Muhammad Tāhir Ibn ‘Ashūr.

## G. Definisi Operasional

- Hasil kajian penelitian ini dimohonkan dapat memberi sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan, dimana pokok faktor hukum pidana islam yang mengenakan pemaparan *maqāsid al-sharī'ah*.

- Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan serta panduan penelitian selanjutnya juga kepada pembaharuan hukum Islam yang mengenakan konsep/sudut pandang *maqāsid al-sharī'ah*

1. Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sebagai bentuk tanggung jawab Jaksa dalam menangani problem/masalah yang dapat di damaikan dengan cara menghentikan penuntutan dengan melibatkan pelaku serta korban dan juga pihak terkait (masyarakat).
2. *Restorative Justice* : sebuah konsep pendekatan atau pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan di mana ingin memberi kesempatan untuk pelaku dengan menebus kesalahannya dan melibatkan masyarakat, korban, dan juga pihak terkait, yang dilakukan di luar pengadilan, tujuannya agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak baik pihak korban dan juga pelaku, maka diharapkan terwujudnya situasi yang sama sebelum peristiwa kejahatan terjadi yakni keadaan dipulihkan kembali serta menahan kejahatan lanjutan, agar bisa dituntaskan secara baik hingga tercapai suatu persetujuan serta keputusan diantara semua pihak (Perdamaian)
3. *Maqāsid Al-Sharī'ah*: ialah kehendak atau upaya dalam hukum islam dengan memperhatikan kesahihan dalil. Dalam bahasa sederhananya ialah



### 3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

### b. Sumber Hukum Sekunder



- #### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan secara teknik yakni mengkaji kepustakaan pada sumber, dokumen, literatur, atau pun data lain yang selaras berupa bahan hukum primer misalnya peraturan, ataupun bahan hukum sekunder yang berbentuk buku-buku serta sumber ilmiah lainnya.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan beberapa tahap, antara lain:

- [illegible]





Bab keempat, data yang di kumpulkan terkait dengan Peraturan Jaksa penuntut Umum No.15 Tahun 2020 akan dipadukan serta di analisis/ditinjau dengan teori Maqasid Al-Shari'ah. Dalam bab ini penulis menganalisis apakah Peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 dapat membawa kemaslahatan bagi manusia, dan bab ini juga membahas Terkait landasan teori konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah*, dimana penulis mengenakan teori maslahat dalam prespektif Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr karena pemikiran beliau selaras dan sesuai dengan bagaimana konsep restoratif justice yang akan mewujudkan dan memelihara maslahat bagi umat manusia.

[illegible]

## BAB II

### A. Biografi Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Ashūr

Muhammad Tahir Ibnu Asyur adalah seorang pemimpin mufti, serta guru yang terkemuka nan mulia sebutan beliau yakni Syaikh al-Imam, beliau merupakan pengajar bagian Tafsir serta Balaghah di Universitas al-Zaituniyyah.<sup>1</sup> Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syazilli bin ‘Abd al-Qadr Ibnu ‘Asyur adalah nama lengkap dari Ibnu ‘Asyur, beliau terlahirkan dari perempuan baik nan mulia yaitu Fatimah putri Muhammad al-‘Azīz. Ibnu ‘Asyur terlahirkan di sebuah kota al-Marasiy di batas ibu kota Tunisia pada tahun 1296 H bulan Jumadil al-‘Ula bertepatan pada bulan September tahun 1879 M, dilahirkan di kastel kakeknya dari ibunya yaitu Muhammad al-‘Azīz Bu’atur sementara kakek yang berasal dari Ayahnya yakni seorang ‘Ulama’ dari keluarga yang mempunyai nasab serta ‘keilmuan yang juga membangsakan secara Ahlul-Bait Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup>

Kakeknya ialah Wazir Agung (Perdana Menteri) awal pada era penjajahan Prancis. Ibnu 'Asyur tergolong darah ulama dari bapaknya serta bangsawan dari ibunya. Ibnu 'Asyur tumbuh di bawah asuhan ayahnya yang sangat berharap putranya bisa meneruskan jejak alim serta berharap Ibnu 'Asyur ini kelak bisa menjadi penggantinya.<sup>3</sup> Ambisi keluarga Ibnu 'Asyur akhirnya terwujud, ketika beliau selesai dalam pendidikannya di al-Zaituniyyah, beliau berjuang mengabdikan yang akhirnya memperoleh beragam kedudukan pada bidang Agama. Aktivitas Ibnu 'Asyur di landasi risalah amanah yang mesti beliau jalani dalam mewujudkan cita-citanya, beliau terbantu oleh keberadaan perpustakaan besar

<sup>1</sup> Musyrif bin Ahmad al-Zuhainy, '*Asar al-Dilalat al-Lugawiyah fi al-Tafsir 'Indalibni 'Asyur* (Baeirut : Muasash al-Rayyan, 2002), 21.

<sup>2</sup> Mani', 'Abd al-Halim, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*', terj Faisa Saleh Syahdianur (Jakarta : PT. Karya Grafindo, 2006), 33.

<sup>3</sup> Al-Galiy, Syaikh al-Jami'ah, 37.

### B. Karir Muhammad Tāhir Ibnu ‘Ashūr.

Muhammad Tāhir Ibn ‘Ashūr ialah sosok pemutakhir Islam masa kini serta ulama terbesar Tunisia, beliau memulai karir guru pada almamaternya. Tak sekedar cakap membimbing, beliau mempunyai cita-cita yang agung serta visi maju yang terlaksana dalam pemutakhiran yang dibawanya. Selama hijrah kariernya di bagian hukum serta lembaga fatwa yang perlahan naik sampai akhirnya Ibnu ‘Ashūr menjadi Mufti Agung, sesudah itu menjadi Shekh Islam mazhab Maliki. Beliau juga termasuk penulis kompeten, karya tulisnya merambah beragam pada bagian keilmuan pengetahuan, misalnya seperti buku ataupun makalah serta artikel keilmuan yang banyak dimunculkan dalam sarana/media cetak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Keberadaan beliau sebagai ulama sangat berharga dan sangat patut dijadikan tauladan karena pada masanya beliau sangat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan serta keislaman.

Kariernya dalam berpendidikan sejak lulus dari Jami' Zaitunah (1899M) ataupun setahun kemudian, beliau menjadi guru pemuka di perguruan Zaitunah. Empat tahun selepas itu (1903) beliau sukses dan menjalani ujian promosi sebagai guru tingkat dua, dua tahun kemudian beliau masuk level satu, serta setahun seusainya (1906) beliau menembus level khuttah at-tadris (guru senior).

<sup>5</sup> Muhammad al-Tahir ibnu 'asyur, *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyyah li alMarzuqy 'ala diwani al-amasah* (Riyadh : Maktabah Dar al-Minhaj, 2008), 11.

Karir Ibnu 'Asyur saat berada dalam lembaga fatwa serta pada bidang hukum di mulai tahun 1911M, saat beliau dinaikkan sebagai hakim anggota di pengadilan agraria. Dua tahun kemudian beliau diangkat sebagai hakim ketua, lantas beliau dilantik menjadi mufti mazhab maliki pada tahun 1923 se usai itu menjadi Mufti Agung 12 bulan kemudian, lalu pada 23 Muharam 1351H tepat tanggal 28 Mei 1932 beliau disematkan dan mendapatkan gelar “Shekh Islam Mazhab Maliki” dikarenakan jabatannya sebagai “Ketua Majelis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki”.

Keikutsertaan Ibnu ‘Asyur demi mewujudkan dunia Islam agar dapat meningkat salah satunya adalah akibat beragam karya tulisnya, baik berupa buku-buku disiplin keilmuan begitu juga artikel-artikel ilmiah yang diluncurkan oleh beragam surat kabar serta jurnal ilmiah terkenal di negara Tunisia serta Mesir. Beliau juga bergabung bersama kerabatnya Khudri Husain melahirkan bacaan *Sa’adah al-‘Uzma*, majalah Islami terkenal awal di negara Tunisia.

Pada tingkat internasional ia menjadi kontributor penting dalam pembentukan *al-Mausu'ah alFiqhiyah* ataupun Ensiklopedi Fikih Islam yang

<sup>7</sup> Al-Galiy, Syaikh al-Jami', 56-58.

Secara bahasa, *maqāsid al-sharī'ah* ialah sebutan ikatan dari dua kata maqasid serta al shari'ah. Maqasid yakni formasi plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* ataupun *qusud* yang mana turunan dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan banyak arti termasuk merujuk sebuah arah, tujuan, *center*, adil, dan tidak pula menjangkau batas, begitu juga jalan yang lurus.<sup>8</sup> Shari'ah, secara etimologi berarti jalan menuju mata air, akses ke mata air ini bisa dinyatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Shari'ah secara terminologi yakni *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran serta al-Sunnah yang mutawatir, sama sekali belum digabung oleh anggapan masyarakat. Shari'ah dalam terjemahan ini meliputi sebuah *aqidah*, *amaliyyah*, serta *khuluqiyyah*.<sup>9</sup> Secara terminologis, *maqāsid al-sharī'ah* diartikan sebagai nilai-nilai serta makna yang menjadikan tujuan dari para ulama mujtahid untuk meneliti teks-teks shari'ah.

Definisi *maqāsid al-sharī'ah* menurut Ibnu Ashur yaitu nilai pelajaran yang menarik perhatian syari' dalam semua kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci ataupun bersifat umum yang mampu disimpulkan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* meliputi beberapa tujuan yang sifatnya umum yakni mengkokohkan maslahat serta menolak penderitaan.

<sup>9</sup>Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

Adapun pemikiran para tokoh mengenai konsep *maqāsid al-sharī'ah* antara lain:

1. Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H)

Beliau menjadi pakar keilmuan (ulama usul al-fiqh). Beliau merupakan ahli teori pertama/awal dimana penting sekali untuk memahami atau mempelajari sebuah konsep *maqāsid al-sharī'ah* dalam meneguhkan suatu hukum Islam. Beliau mengatakan bahwa tidak akan bisa seseorang dikatakan cakap dalam menentukan hukum dalam Islam, sebelum seseorang itu mampu memahami secara benar tujuan Allah memberikan perintah-perintah serta larangan-larangan-Nya.<sup>10</sup> Beliau ialah sosok pertama yang mengkategorikan pembagian Maqasid Syariah yang akhirnya disederhanakan menjadi tiga jenis yakni level pokok/primer (*Ḍarūrīyah*), level/tingkat keperluan/sekunder (*Hajīyyah*) serta level/tingkat pelengkap/tersier (*Tahsīniyyah*).<sup>11</sup>

## 2. Imam al-Ghazali (w. 505 H)

Beliau beranggapan bahwa hubungan yang terwujud antara syariat dengan istilah merupakan suatu hubungan yang sangat erat sekali. Masalahat menurut al-Gazali ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima formasi masalahat diatas bagi al-Gazali berada pada skala kebutuhan serta tingkat yang tak sama jika suatu masalahat itu diketahui dari sisi tujuannya, yakni peringkat pokok/primer (*Ḍarūrīyah*), kebutuhan/sekunder (*Hajīyyah*), pelengkap/tersier (*Tahsiniyyah*)<sup>12</sup>.

3. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H)

Al'IZZ ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) merupakan kalangan Syafi'iyah. Beliau menegaskan rancangan maslahat mendasar pada sebuah bentuk menarik manfaat serta menolak mafsadat. Pada pandangan beliau , maqasid ataupun mafsadah itu selalu dalam dua jenis yaitu, *nafis serta*

<sup>10</sup> Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqhs Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 101.

<sup>11</sup> Ibid., 2.

<sup>12</sup> Al-Ghazali, al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I (Kairo: al -Amiriyah, 1412), 250.



Penelaahan mengenai *maqāsid al-sharī'ah* secara khusus, runtut serta akurat salah satunya dilaksanakan oleh al-Syatibi dari golongan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* yang terpopuler itu, beliau menyelesaikan kurang lebih sepertiga paparannya mengenai *maqāsid al-sharī'ah*. Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa terwujudnya suatu kemaslahatan hidup manusia, baik saat di dunia serta juga di akhirat ialah merupakan tujuan Allah dalam menetapkan berbagai hukum-Nya. Oleh karenanya, *taḳlīf* dibidang hukum harus mengarah pada teraihnya tujuan hukum tersebut.<sup>14</sup> konsep al-Gazali mengenai maslahat yakni mengamalkan lima hal inti, antara lain : agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Al-Syatibi mendeskripsikan tiga aliran yang dapat diikuti ulama usul fikih dalam upaya menyingkap/memahami *maqāsid al-sharī'ah*.

Sepeninggal imam Syatibi, kajian *maqāsid al-sharī'ah* ini sempat padam, dalam artian tidak ada lulusan tinggi Islam terkhusus yang merelakan atau yang memfokuskan diri dalam mempelajari bidang maqasid. Kemudian, di setengah akhir dari abad ke 20 masehi, wacana *maqāsid al-sharī'ah* kembali hadir dan di munculkan oleh ulama asal Tunisia yakni syaikh Muhammad Tāhir Ibn ‘Ashūr, pada tangan Ibn ‘Ashur inilah sebuah konsep *maqāsid al-sharī'ah* yang sudah direncanakan sejak lama oleh imam Syatibi dilanjutkan. Ibnu ‘Ashur membubuh kan gagasan

<sup>14</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 4-5.

maqasidnya khusus dalam buku *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (tebal 216 halaman).

Dalam pandangan Ibn ‘Ashur konsep *maqāsid al-sharī’ah* berdiri dalam fitrah manusia. Berlandaskan firman Allah Swt dalam surat ar Ruum ayat 30 serta surat al A'raf ayat 119, Ibn ‘Ashur mendeskripsikan bahwa merawat fitrah seseorang merupakan cakupan dari konsep *maqāsid al-sharī’ah*, karena menurut Ibn ‘Ashur syari'at Islam tidak akan pernah bertolak fikiran dalam diri manusia, selagi manusia itu dalam keadaan biasanya.<sup>15</sup>

#### D. Dimensi –Dimensi Maqasid

Tujuan syari'ah meliputi tiga aspek *maqāsid al-sharī'ah* yakni meliputi tiga hal utama: *Ḍarūrīyah*, *Ḥajīyyah* serta *Taḥsīniyyah*. Pengelompokan ini dilandaskan pada level kepentingan serta skala prioritasnya. Urutan rangking ini akan terbaca dari keperluannya, bila kemaslahatan yang ada pada tiap peringkat satu sama lain berebut posisi. Mengacu konsep, peringkat *Ḍarūrīyah* menempati urutan satu, kemudian *Ḥajīyyah* serta terakhir *Taḥsīniyyah*. Bisa dimaknai bahwa peringkat tiga melengkapi peringkat dua serta peringkat satu dilengkapi oleh peringkat kedua.<sup>16</sup>

### 1. *Ḍarūrīyah* (Primer)

Diartikan sebuah keinginan/kebutuhan yang tidak bisa diabaikan ataupun ditunda eksistensinya dalam hal mempertahankan keutuhan lima inti kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan meneguhkan pokok-pokok yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak penderitaan (*al-mafasid*) yang akan terjadi pada masa mendatang, ataupun pada masa sekarang. Penangguhan ataupun menafikan peringkat satu ini hanya akan menimbulkan bahaya keberadaan kelima inti tersebut (*al-umur al-khamsah*).

<sup>15</sup> Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ilm, t.th), 57.

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.





Berbagai kalangan sarjana maqasid modern salah satunya yang pemaknaan *maqāsid al-sharī'ah* secara akurat serta komprehensif-protektif (*jami'-mani'*) ialah Ibn 'Ashur. Tidak sama dengan rancangan *maqāsid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh ulama sebelumnya seperti al-Gazali serta al-Shatibi, Ibn 'Ashur mengatakan point *maqāsid al-sharī'ah* yang diinginkan oleh syara' yakni dengan pelaksanaan syariah Islam. Berikut akan dipaparkan apa yang akan ditelaah mengenai pemikiran maqasid Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur:

- yakni suatu maksud serta pelajaran yang ditinjau Tuhan pada semua ketentuan syariah, sebagian besarnya tidak terkhususkan dalam sebuah jenis hukum syariah yang khusus. Beliau menegaskan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* mempunyai dua sifat, yaitu sifat umum yang mencakupi semua shari'ah serta sifat khusus seperti *maqāsid al-sharī'ah* yang khusus dalam bab-bab fiqh, hukum muamalah, hukum keluarga dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Ibnu Ashur mengkategorikan *maqāsid al tashri' al- 'āmmah* dengan empat sifat yakni yang pertama sifatnya tetap (*al thubut*). Kedua, jelas (*al duhur*) yakni bersifat mutlak dimana tidak menyebabkan perbedaan dalam hal mengartikan. Ketiga, terukur (*inpadabat*), yakni sebuah artian yang memiliki batas akurat misalkan menjaga pikiran yang tujuan dengan dishariatkannya hukuman, contohnya hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. Keempat, otentik (*itrād*), yakni apabila sebuah tujuan shara' tidak didiskusikan sebab adanya perbedaan lingkungan. Penggalan dari *maqāsid al tashri' al- 'āmmah* sebagai berikut:

- <sup>18</sup> Ibn ‘Ashur, Muhammad Ṭahir, “*Maqasid al-shari’ah al-Islamiyyah*” (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li al-tawzi’, t.th). 51.

## 2) Toleransi (*al-Samahah*)

### 3) Maslahat (*al-Maslahah*)

#### 4) Kesetaraan (*Al-Musawah*)

[illegible]

*b. Maqasid al khasah*

2. Dasar pemikiran Ibnu ‘Asyur dalam membuat maqasid (*fitrah, masalahah, serta ta’lil*).

Tauhid, petunjuk, serta kebenaran merupakan fitrah yang Allah SWT ciptakan bersamaan dengan waktu menciptakan manusia, nabi Adam AS ialah cerminan pertama bagaimana keadaan yang ada pada diri manusia. Ibnu ‘Ashur menegaskan pentingnya fitrah yakni guna menolong ahli fiqih dalam merangkum suatu hukum, sebab dalam

<sup>20</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179.

Sifat fitrah ini bertolak pada suatu tindakan, dengan mengkombinasikan keduanya yakni menggabungkan fitrah dengan tindakan dianggap mampu maka dapat di gabungkan, akan tetapi jika fitrah di gabungkan dengan tindakan tidak memungkinkan maka dipilih salah satu perbuatan yang menyebabkan fitrah dapat dipelihara. Alal al Fasi mendeskripsikan pengertian fitrah yakni setiap kemaslahatan ialah fitrah, seperti ikhlas, amanah, apadal, jujur, tepat janji, lemah lembut terhadap sesama, keterbukaan. Dan jika sebaliknya maka sifat itu dianggap melawan fitrah.<sup>21</sup>

Ibnu Ashur mengartikan masalah ialah suatu tindakan yang memiliki tujuan memunculkan kebaikan, bermanfaat selamanya baik untuk mayoritas maupun untuk individu. Terdapat dua sifat masalah yakni masalah bersifat umum ataupun khusus, mashlahah bersifat khusus ialah mashlahah yang dapat diterima manfaatnya oleh perorangan dengan munculnya tindakan dari suatu kelompok/individu yang nantinya juga berguna untuk kepentingan masyarakat yang juga terdiri dari para individu. Sementara mashlahah global dapat diterima dari dampak logis mashlahah khusus, misalnya memelihara harta dari *israf* (tidak berlebih-lebihan).<sup>22</sup>

Menurut Ibnu Ashur mencari *illat* ialah inti yang paling sempurna yang digunakan dalam pemikiran syariah, karena seyogyanya bertujuan

<sup>22</sup>Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *"Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah"* (Yordania: Dar al Nafais, 2010), 68.

Fitrah disini merupakan salah satu posisi penting dalam membentuk sebuah teori *maqasid*, dengan disesuaikan secara shara' maka tujuan syariah harus berlandaskan pada fitrah yang mana dasar umumnya ialah guna jalb al masalih serta dar'u al mafasid (mengadakan kemaslahatan serta menahan kerusakan), diwujudkan dalam ijtihad fiqh, rasionalisasi dalam konsep maqashid serta istinbat hukum. Kemudian beliau mendeskripsikan berkenaan masalah maqsudah shar'an yakni kebenaran yang diharapkan oleh shara'. Mengenai *ta'lil* ialah sebuah cara rasionalisasi pada suatu bidang Syariah, karena *ta'lil* merupakan sebuah jawapan dengan tujuan menghubungkan “terbatas-nya” tulisan yang kerap terjadi karena berkembangnya suatu problem/masalah dalam kehidupan serta untuk wadah dalam menemukan ciri aturan serta batasan hukum.

- Pada paparan *maqashid* Ibnu Ashur *Al Maqam* yakni membedakan antara suatu tulisan syar'i dengan ruhnyanya. Dalam hal ini mashlahah yang diharapkan syara' tidak bisa dimengerti dari makna asal sebuah tulisan yang di maksud, namun bisa dimengerti dari arti yang tersirat dari sebuah makna teks tersebut yang tersembunyi.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Ibid., 326.



*Maqam* merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh Ibnu Ashur dalam memunculkan teorinya. Menurutnya *maqam* harus dimunculkan dalam fiqh shari'ah. Tujuan dimunculkan *maqam* yakni yang pertama, guna menafsirkan suatu tulisan/dalil, kedua guna mencari *illat* hukum, serta ketiga membuat dalil pada sebuah hukum.

Secara bahasa *istiqla'* yaitu mengamati serta menelaah, namun menurut istilah *Istqla'* berarti menyimpulkan sebuah penelitian dari fenomena hukum yang sifatnya segmental ke hukum universal. *Istiqla'* terbagi menjadi dua yaitu *istiqla' naqis* serta *istiqla' tam*. *Istiqla' naqis* yakni menyumbangkan suatu hukum dari yang segmental ke luas. sementara *istiqla' tam* yakni menuangkan suatu hukum pada semua komponen parsial kepada hukum secara keseluruhan.

c. *Wasilah* (perantara) serta *Maqasid*

Mujtahid tidak boleh hanya berpokok pada satu tulisan shar’i tetapi juga patut memahami dan mengamati suatu teks-teks atau dalil-dalil yang terkadang juga memberikan sebuah sketsa global, menerangkan

[illegible]

Maslahat disini terpecah tiga bagian yakni, maslahat daruriyat, hajiyat serta tahsiniyat. *Maslahat Ḍarūrīyah* diartikan berupa keperluan yang tidak bisa diabaikan ataupun di tunda keadaannya demi menjaga kesatuan lima inti kemaslahatan (*al-umūr al-khamsah*), yang tujuannya untuk menolak penderitaan (*al-mafasid*) yang akan terjadi pada masa mendatang. Penundaan pada maslahat *Ḍarūrīyah* akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

*Maslahat al Hajiyyah* ialah maslahat yang diperlukan dalam sebuah keadaan yang tidak mengancam keberadaan kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. *Maslahat Tahsiniyyah* adalah keperluan penunjang peningkatan kedudukan manusia dalam lingkungan dan di hadapan Tuhannya, masalah ini memperhatikan serta menyesuaikan dengan kepatutannya yakni dengan kesempurnaan serta keteraturan manusia agar bisa terealisasi. Maslahat ini merupakan salah satu maslahat yang menarik hamba lain untuk berhubungan secara umat islam. misalnya bupada pekerti yang mulia.<sup>28</sup>

- b. Maslahat dilihat dari segi kaitannya secara global, golongan, maupun perorangan

<sup>28</sup> Ibid., 78.



c. Maslahat ditinjau dari segi terealisasinya suatu kepentingan ataupun tercegahnya ke kehancuran

Maslahat yang terlihat dari tulisan yang didorong oleh teori ataupun suatu dalil akal, bahwa dalam pengamalannya terdiri sebuah kebaikan yang besar serta juga pada pengaplikasian hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, contohnya pada masa Khalifah Abu Bakar as Sidiq membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Maslahat ini dapat dilihat dari persangkaan akal sehat, contohnya merawat seekor anjing dengan tujuan sebagai penjaga rumah pada saat terjadi kondisi yang membahayakan, serta maslahat ini ada karena juga dibuktikan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi Muhammad SAW *“La yaqdia al qadi wa huwa ghadban”* seorang hakim yang sedang marah atau tidak enak hati dilarang memutuskan sebuah problem/masalah.

Ialah pengumpulan ada sebuah kemaslahatan serta kebaikan, namun ketika sudah diamati kemaslahatan itu berubah menjadi kehancuran, contohnya mengenakan narkoba. Adanya suatu masalah dikarenakan sebuah tujuan dari kelakuan/perlakuan ataupun karena implementasi dari suatu tingkah laku manusia.

[illegible]

- 4) *Metode tatollu'at* (observasi), *tafatانات* (pemahaman), serta *madahir* (fenomenologi).

Metode observasi ialah mengenakan hilah /rekayasa, serta dzarai'/jalan menuju yang lain, paham/tafanat yakni dengan mengenakan 'ilal (ilat-ilat hukum), fenomenologi yakni peninjauan yang dilihat dari keutamaan hukum Islam serta ciri universal serta keteguhan hukum Islam. *Maslahat qot'iyah, dzanniyah, wahmiyah* merupakan awal dari kemunculan metode ini<sup>30</sup>.

5. Sifat-sifat dari *Maqāsid Al-Sharī'ah* menurut Ibnu 'Ashur kembali pada empat sifat yaitu:

- a. Arahan fitrah bagi *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Sifat dasar fitrah merupakan adanya tindakan yang toleransi, tidak ada sebuah desakan dari pihak lain, kekukuhan serta penggantian syariat, persamaan, maupun kebebasan. Berdasarkan pada fitrah maka sebuah hukum bisa menjadi moderat serta yang mendahulukan sebuah kepentingan umum, maknanya akan mudah diterima oleh masyarakat umum serta juga memenuhi rasa keadilan.<sup>31</sup>

- b. Merealisasikan serta memuliakan Shari'ah

Metode mewujudkan syariah ada dua, yang kesatu yaitu dengan menggunakan ancaman/gertakan hukuman yang berat dan kemudian dinasehati, yang kedua yaitu tidak menyusahkan serta juga penuh kasih sayang. teknik yang kesatu disini dikategorikan secara beragam, diantaranya diharamkannya menyiasati suatu hukum, menghalangi, jalan kerusakan ditutup, serta memberikan otoritas bagi penguasa. Sementara yang kedua disini tidak menyulitkan suatu hukum syariah, yakni mengubah sebuah hukum dari yang sulit jadi tidak sulit ataupun dari

<sup>30</sup> Ibid., 91.

<sup>31</sup> Ismail Al Hasani, "*Nadzariyat al-Maqashid 'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*" (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), 242.

yang keras menjadi lembut, contohnya seperti mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan .<sup>32</sup>

## 6. Tujuan Shari'ah

Kuatnya aturan serta ketenangan jiwa ialah salah satu target syariah yang dapat diwujudkan, hal ini dapat terlaksana yakni dengan metode *ijtihad* metode *rukhsah*.

*a. Ijtihad*

yakni menimbang suatu dalil shara' serta menumpahkan seluruh kekuatan/kemampuannya dengan tujuan membuka maksud shari' dari pembuat syariat (ALLAH SWT)

*b. Rukhshah*

Diperuntukan oleh manusia yang mengalami kesusahan serta bisa menimbulkan berubahnya sebuah hukum dari ‘azimah menjadi rukhshah.

<sup>32</sup> Ibid., 292.

## BAB III

***Restorative Justice* Dalam Peraturan jaksa No.15 Tahun 2020  
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan  
Hukum**

### A. Restorative Justice

*Restorative justice/keadilan restoratif* ialah sebuah konsep pendekatan ataupun pemulihan hubungan, yakni memberi kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya dengan melibatkan masyarakat, korban, serta pihak terkait yang dilakukan di luar pengadilan, bertujuan supaya meraih kebaikan bagi semua orang dan mengaharpakan akan ada keadaan ataupun kondisi yang tidak berbeda dengan sebelumnya kejahatan itu terjadi (keadaan padapulihan kembali), menahan peristiwa lanjutan kejahatan (pembalasan), serta bisa diselesaikan secara baik, serta tercapai suatu mufakat dan kebaikan diantara semua orang yang terlibat (Perdamaian).

Penanganan perkara kriminal yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bermanfaat bagi semua orang dan merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilihat dari sejarah, penyelesaian perkara menggunakan konsep ini ternyata sudah terjadi berabad-abad sebelumnya, dengan mempersepsikan gagasan untuk mengurus problem/masalah melalui metode ini salah satunya di dalam *Kode Ur-Nammu*, buku hukum paling lama yang ditulis sekitar tahun 2000 (SM) di negara Sumeria, secara gamblang mengungkapkan komitmen untuk membayar kompensasi bagi pelaku kejahatan.

Terdapat sebuah pepatah mainstream di Negara Jerman (kalau tidak ada tuduhan, maka tidak ada penyelesaian yang diselesaikan oleh hakim di pengadilan ( "*wo kein ist, ist kein richter*"). Adanya harmoni yang dilakukan dengan terjadinya pertemuan, membayar kompensasi kepada korban dan

Dalam penanganan problem/masalah menggunakan *restorative justice* berubah menjadi keadilan retributif, bersamaan dengan pengambilalihan perkara pidana oleh negara hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dimana situasi ini ditandai dengan perubahan penuntutan oleh otoritas negara yang disebut pemeriksa prihat menjadi publik. Dengan adanya perpindahan pengalihan perkara tersebut oleh negara, maka pengambilalihan ini membuat pemenuhan hak korban tidak terealisasi serta campur tangan negara semakin berkuasa. Akan tetapi dalam kelompok adat di negara Indonesia konsep *restorative justice* masih diberlakukan.

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *“Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia”*, Makalah disampaikan pada seminar nasional *“Peran Hakim dalam meningkatkan Profesionalitas menuju Paradigma Yang Agung”*, diselenggarakan IKAHl dalam rangka Ulang Tahun IKAHl ke-59 tanggal 25 April 2012, 1.

Jelas dan terlihat dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi bukti dengan dilaksanakannya "Kongres untuk pencegahan kejahatan dan perlakuan yang di langgar" 5 tahun sekali kongres PBB digelar . Dalam arsip pendukung Kongres PBB kesembilan tahun 1995 yang mengidentifikasi secara administrasi pengadilan yang dijatuhi hukuman, ditekankan pentingnya semua hal yang dianggap "untuk memperkuat beberapa elemen otorisasi hukum serta kesetaraan" dan "(ADR) Alternatif Penyelesaian Sengketa" yang menggabungkan pembayaran/ganti kerugian, intervensi, kompensasi, serta penempatan dalam kerangka keadilan kriminal.

Dari paparan di atas, cenderung terlihat bahwa kemajuan saat ini menyatakan bahwa pendekatan keadilan yang bermanfaat sebagai penanganan problem/masalah menjadi minat para analisis kerangka pidana dalam berbagai belahan dunia. Bahkan PBB usai mendukung metodologi terapeutik sebagai metodologi yang bisa dimanfaatkan dalam kerangka keadilan pidana tingkat lanjut. Sementara itu, negara-negara juga mendorong untuk mengaktualisasikan standar keadilan yang bermanfaat dalam metode hukum.. Perhatian dunia yang absolut mengenai konsep restorative justice ini karena kebermanfaatan/hasil yang baik untuk mencapai keadilan dalam menangani problem pidana, dan juga karena metodologi ini memiliki keunggulan yang sangat besar dibandingkan dengan metodologi yang digunakan dalam kerangka keadilan pidana konvensional.<sup>2</sup>

Untuk lebih memahami teori *restorative justice*, berikut ini beberapa deskripsi oleh pakar hukum mengenai sebutan, makna, serta kerangka *restorative justice* :

1. *Tony Marshall* :

[illegible]

(Keadilan restoratif ialah sebuah lingkungan kerja baru terhadap suatu pelanggaran serta konflik, yang secara cepat bisa diterima serta didukung jurisdiksi dan himpunan sosial serta juga konseling sosial serta himpunan masyarakat. Keadilan restoratif dilandaskan pada sebuah pendekatan nilai tanggapan dari pelanggaran serta problem dimana fokusnya pada korban, pelaksana kejahatan serta warga yang terdampak.<sup>4</sup>

Sementara itu, secara konseptual *restorative justice* dikelompokkan dalam tiga konsep, yaitu :

Gagasan ini melihat keadilan restoratif merupakan langkah penanganan persoalan, dimana dalam hal ini berbagai persoalan yang telah ditimbulkan dari suatu tindakan pidana bisa diselesaikan secara

<sup>4</sup> Ibid., 66.



Rancangan ini melihat keadilan restoratif sebagai sebuah rancangan keadilan yang mengunggulkan perbaikan kembali terhadap kerugian (*harm*) yang dialami korban tindak pidana ketimbang sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya (*reestablish just realitions*). Berfokus pada apa yang harus dilakukan guna membentuk kembali hubungan yang baik ketimbang membalas perlakuan tersangka dengan menghukumnya/memenjarakannya.

Rancangan ini melihat keadilan restoratif sebagai sebuah jalan hidup (*way of life*). Simpatisan rancangan ini mengamati bahwa *restorative justice* bisa mencapai suatu masyarakat yang adil damai tanpa ada pembalasan (*achieving a just society*), dengan demikian bisa diraih lewat sebuah transformasi guna memahami harapan setiap orang dari masyarakat serta lingkungan. Pendekatan yang dipakai yakni kebutuhan dan hak bagi semua pihak (pelaku, korban, serta komunitas/pihak terkait).<sup>5</sup>

Pembinaan hukum yang berkembang memposisikan para pelaksana/pelaku hukum di paling depan. Penegakan hukum progresif mendesak agar tersangka/pelaksana tindak pidana mementingkan kebenaran serta ketulusan dalam melaksanakan hukum yang berlaku. Mereka wajib memiliki empati serta kepedulian terhadap kesusahan yang dialami orang lain karena perbuatannya. Ketidaknyamanan rakyat serta masyarakat patut menjadi titik orientasi serta arah akhir/tujuan adanya suatu hukum.

[illegible]

Sehingga standar keadilan di Indonesia juga melibatkan korban, pelaku, dan pihak tertaut di dalamnya, khususnya yang berkenaan dengan kewenangan penyidik serta pemeriksa, hendaknya dituangkan dalam suatu pedoman hukum. Dengan begitu kemajuan otoritas publik serta lembaga pengadilan penting untuk membantu kemajuan pemeriksa serta penyidik untuk melaksanakan keadilan perbaikan, terutama dalam mengurus suatu tindak kejahatan criminal, yang dilakukan diluar pengadilan dengan tujuan menetapkan kembali keadaan awal sebelum terjadinya kejahatan dan untuk menghindari akan terjadinya pembalasan.<sup>6</sup>

Dari segi tujuan, supremasi hukum digagas agar hak warga negara terlindungi dari kewenangan negara. Tujuan utamanya yakni untuk menjaga hak-hak warga negara. Supremasi hukum melalui pendekatan *restorative justice* berorientasi pada sistem pemerataan yang mendudukan korban sebagai bagian inti dari tujuan adanya konsep ini. Melalui pendekatan *restorative justice*, penanganan problem pidana diharapkan bisa bermanfaat bagi semua

[illegible]

Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung pendekatan restorative justice , yaitu sebagai berikut:

Ketentuan dalam KUHP mengenai *restorative justice* terdapat dalam pasal 82 KUHP (Pasal 74 /KUHP Belanda). Ketentuan pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghilangan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut memuat bahwa hak menuntut karena terjadinya pelanggaran yang hanya di ancam dengan pidana denda, serta tidak lagi berlaku apabila denda maksimum sudah bayar, serta apabila perkara tersebut sudah terlanjur diserahkan ke jaksa penuntut umum, maka pembayarannya disertai dengan ongkos/biaya perkara.

<sup>7</sup> <http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html>, diakses tanggal 5 Desember 2020.

Dalam KUHAP, ketentuan restorative justice terdapat dalam pasal 98 KUHAP yaitu mengenai gugatan ganti rugi atas tindakan yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian yang di atur dalam pasal 98 KUHAP di dasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menyebabkan kerugian kepada orang lain/korban. Dan kepada orang tersebut bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian di ajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (Penggabungan perkara). Apabila dalam pemeriksaan perkara tersebut penuntut umum tidak datang, maka permintaan tersebut akan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim membacakan putusannya.

Mackay secara rinci mengatakan sebuah dasar *restorative justice*, baik yang terkait dengan pelaku, korban, dan dengan usaha perbaikan serta pemberian ketegasan/hukuman, aparat penegak hukum, lembaga yang sesuai institusi peradilan, sistem peradilan pidana, maupun mediator yaitu sebagai berikut:

- [illegible]

Merupakan penyelesaian problem/masalah mengenakan pendekatan keadilan restorative pada hakikatnya ialah sebuah pilihan yang ditawarkan, namun tak berarti menghapus system perdilan konvensional.

e. Masih memperhitungkan nilai-nilai hak prinsip manusia dalam kehidupan, bahkan hal tersebut menjadi persyaratan penting yang wajib dilengkapi pada penanganan problem/masalah dengan pendekatan restorative justice.

Merupakan jaminan keamanan bagian tuk menentukan apakah tahap tersebut berlangsung secara baik ataupun tak baik.

Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan serta beragam bentuk perbaikan, contohnya ganti rugi, kompensasi, perbaikan atas timbulnya kerusakan, permintaan maaf serta berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak akan bertolak secara hukum yang hidup dalam masyarakat.

Merupakan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada hakikatnya adalah pilihan.

b. Pelaksanaan tidak boleh melanggar kaidah-kaidah mengenai batasan kemanusiaan serta aturan masyarakat pada umumnya, serta bisa diperoleh dan dilakukan oleh pelaku.

Merupakan pemberian sanksi kepada pelaku serta ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan pada penanganan problem/masalah, mengenakan

Ialah perdamaian hubungan sosial yang ada dalam masyarakat di dunia.

- Ukuran nilai kearifan lokal dari masyarakat yang harus diperhatikan.







- Model penyelesaian perkara mengenakan pendekatan *restorative justice* Menurut *Stephenson, Giller serta Brown* , yaitu :

Model ini dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Dalam model ini, penerapan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara membangun pertemuan, diskusi antara pelaku serta tersangka serta aspek ketiga yang bertindak sebagai mediator yang bertindak sebagai koordinator serta fasilitator dalam forum pertemuan yang berkewajiban membantu aspek berkomunikasi satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan.

Mediator disini bisa dari aparatatur formal, mediator independen, ataupun joint venture. Mediasi ini dilakukan antara korban serta tersangka. Model ini memiliki variasi yang berkategori-kategori pada setiap tahapannya, yaitu pada tahapan kebijakan kepolisian, pada tahapan penuntutan / tekanan, serta juga pada tahapan pemidanaan, maupun seusai diapidana, serta bisa dilakukan untuk semua jenis tersangka pidana, ada pula yang digunakan untuk jenis tindak kejahatan tertentu seperti perampokan, ataupun tindak kekerasan serta ada juga yang khusus untuk anak.

[illegible]



Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam hal ini disebut kejaksaan merupakan organisasi tempat bernaungnya para jaksa. Kejaksaan merupakan sistem peradilan pidana, salah satunya diatur dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) beserta seluruh jajaran peradilan di bawahnya, juga terdapat badan-bvadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Kewenangan jaksa menghentikan ataupun tidak memproses tuntutan, antara lain jaksa bebas mengaplikasikan peraturan mana yang akan di dakwakan ataupun tidak di dakwakan, selaras dengan hati nurani serta profesional kejaksaan. Pada tahun 2020 kejaksaan mengeluarkan peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, disini kejaksaan mengenakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian di luar pengadilan yang diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan sistem peradilan konvensional. Selain itu ketidakpercayaan public terhadap aparaturnya penegak hukum juga sangat tinggi, oleh karena itu, pembangunan hukum kejaksaan membuka peluang bagi penerapan

[illegible]

*restorative justice* dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang terdapat dalam peraturan jaksa penuntut umum no.15 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.<sup>13</sup>

1. Implikasi Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan bagi Pemangku Kepentingan

Setiap kebijakan pada hakikatnya akan membawa implikasi bagi para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula dengan implementasi pokok-pokok restorative justice setidaknya bisa membawa implikasi hukum bagi empat pihak, yaitu pelaku, sasaran, masyarakat, serta komponen sistem peradilan.

a. Pelaku

Tindak pidana muncul ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap norma-norma yang memuat mengenai sanksi-sanksi pidana. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, dan bisa pula dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain. Dapat dikatakan pasti ada pelaku kejahatan pada setiap tindak pidana dengan kata lain tidak ada kejahatan tanpa adanya pelaku kejahatan.

Terkait dengan pelaku kejahatan, dalam hukum dikenal istilah pertanggung jawaban (*toerekenbaarheid/criminal liability*). Munculnya terminology pertanggungjawaban erat dengan kaitannya penentuan bisa-tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atasnya pidana akibat tindakan yang dilakukannya. Dalam suatu tindak kejahatan, dikategorikan ada suatu kesalahan apabila ia mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, maka unsur kesalahan sangat terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila yang bersangkutan bisa menentukan pilihan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

<sup>13</sup> Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 194.

b. Korban

Korban langsung atau pun korban primer adalah seseorang yang mengalami tindak kejahatan yang akibatnya dari tangan pertama. Adapun korban tidak langsung atau pun korban sekunder adalah korban yang tidak langsung mengalami tindak kejahatan, namun juga menderita secara emosional ataupun juga finansial, tetap tidak langsung dilibatkan maupun dirugikan (seperti anggota keluarga).

Hukum serta masyarakat pada hakikatnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukum, hal ini tergambar jelas secara adagium yang sangat terkenal

[illegible]

Dalam kaitannya secara implementasi aturan hukum mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kejaksaan melalui pendekatan restorative justice, tentu saja hal tersebut juga membawa implikasi bagi masyarakat, baik itu masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang sering kali berinteraksi secara langsung dengan pelaku ataupun korban (komunitas pelaku/sasaran), maupun masyarakat dalam arti luas. Komunitas pelaku maupun komunitas korban bisa turut berpartisipasi dalam mencari bentuk penyelesaian yang menguntungkan para pihak. Masing-masing komunitas bisa menyuarakan kepentingannya, sehingga bila bentuk penyelesaian itu telah disepakati bersama, diharapkan bisa memutus dendam antara komunitas pelaku serta komunitas korban pada kemudian hari. Hal ini bisa diartikan bahwa penyelesaian seperti ini bisa menghindarkan pertikaian antar komunitas yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penutupan problem demi keperluan hukum tertera pada Bab II dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Disini di jelaskan bahwa penuntut umum berwewenang menuntaskan perkara atas nama keperluan hukum dalam hal terdakwa sudah meninggal dunia, tuntutan yang sudah kadaluarsa. Pengadilan memutuskan yang pernah menerima hukum tetap di atas problem yang tak juga beda, yang biasa disebut nebis in idem, pengaduan tindak pidana aduan dicabut ataupun ditarik kembali karena sudah ada penanganan problem diluar pengadilan. Penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bertanggung jawab penuh yang akan diajukan lewat bertahap kepada kepala Kejaksaan Tinggi.

3. Syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

3. Syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.



Dalam hal terpenuhinya syarat perkara tindak pidana bisa di tutup demi hukum serta dihentikan penuntutannya sesuai keadilan restoratif yakni yang pertama pelaksana baru pertama kali melaksanakan tindak kejahatan, yang kedua tindak pidana hanya di ancam dengan pidana denda maupun penjara tidak melebihi lima tahun, serta yang ketiga tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti maupun nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan akibat tindakan pelaku senilai tidak melampaui Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

- a. Sudah ada suatu keadaan yakni perbaikan ulang situasi semula yang dilaksanakan oleh pelaksana tindak pidana dengan upaya barang diterima kembali dan diberikan oleh korban, ganti rugi yang dialami korban, mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana, rehabilitasi kerusakan yang disebabkan dari tindakan pelaku,
- b. kata sepakat damai antara korban tindak pelaku serta tersangka/pelaku.
- c. Warga merespon secara baik serta positif



Dilakukan dengan usaha damai yakni penuntut umum menawarkan secara damai kepada sasaran tindak pidana serta tersangka yang padamana dilakukan tanpa ada tekanan paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian bisa dilakukan oleh tersangka kejahatan pada tahap penuntutan yaitu ketika penyerahan tanggung jawab tersangka serta barang bukti. Dalam pelaksanaan perdamaian penuntut umum melaksanakan panggilan terhadap sasaran secara sah serta penuntut umum harus mengatakan sebab pemanggilan.

<sup>15</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III, Pasal 4-5.

Pertemuan yang tenang dilakukan dengan musyawarah yang sengaja untuk sampai dan meraih kesepakatan, tidak dibatasi, tidak dipaksakan serta ditakuti oleh pertemuan apapun. Dalam siklus yang tenang, pemeriksa/mediator bertindak sebagai fasilitator dimana penyidik tidak memiliki salah satu yang sedang dipihaknya dalam artian harus netral baik kepada orang yang bersangkutan atau pun tersangka, secara ahli ataupun sebenarnya, dengan lugas ataupun berimplikasi. Siklus keharmonisan diselesaikan pada kantor pemeriksa, kecuali jika dalam keadaan yang merepotkan/ketidakmungkinan karena alasan keamanan, kesejahteraan, ataupun kondisi topografi, maka siklus harmoni bisa dilakukan di tempat kerja pemerintah / kantor yang berbeda yang ditegaskan dengan surat perintah dari Kepala Dinas Kantor Kejaksaan. Siklus keharmonisan serta kewajiban dilakukan dalam batas waktu 14 hari mulai dari menyerahkan tugas kepada tersangka serta pembuktian yang solid (tahap dua).

Selama siklus harmoni, tujuan serta spekulasi diselesaikan pada perjanjian non-agresi yang disusun dihadapan penyelidik, secara khusus menyetujui harmoni yang digabungkan dengan menyelesaikan tugas ataupun menyetujui harmoni tanpa kepuasan usaha tertentu, pada saat itu akan didukung oleh tujuan, tersangka, serta 2 orang pemeriksa yang dikenal oleh pemeriksa publik.

[illegible]



**TINJAUAN *MAQASID AL-SHARI'AH* TERHADAP KONSEP  
*RESTORATIF JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15  
TAHUN 2020**

Penerapan rancangan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan, memiliki korelasi serta relevansi secara nilai-nilai Hak Prinsipil Manusia (HAM), membawa implikasi yang positif bagi pelaku, korban, masyarakat, serta komponen sistem peradilan, konsep *restorative justice* pada penanganan perkara di luar pengadilan oleh jaksa yang juga harus relevan secara tata nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dengan adanya penanganan perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dalam Peraturan Jaksa No. 15 tahun 2020, hal ini sangat selaras pokok peradilannya cepat, sederhana, serta biaya

[illegible]

Perlindungan terhadap kehormatan serta martabat bisa di lihat dari mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan kepada para pihak dalam menjaga kerahasiaan bila dalam proses terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan serta martabat para pihak. Adapun hak untuk perlindungan harta benda bisa dilihat dalam pokok-pokok *restorative justice* terkait dengan pemberian sanksi serta pembayaran ganti rugi.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari pendekatan *restorative justice* ialah memulihkan kerugian korban melalui pembayaran ganti rugi dari pelaku. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan terhadap harta benda serta hak milik pribadi. Hak atas milik pribadi yang tidak bisa di ambil alih seenaknya oleh siapapun di atur dalam pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bila hal tersebut dikaitkan dengan pendekatan *restorative justice*, maka di simpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* sangat relevan dengan hak atas milik yang tidak boleh di ambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh karena itulah, maka siapapun yang merasa dirugikan secara materiil akibat terjadi nya kejahatan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku kejahatan. Dengan pulihnya kerugian korban, maka korban akan memberikan pengampunan kepada pelaku.

Hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan guna perlakuan ataupun tidak melakukan ialah hak prinsipil manusia yang terdapat dalam ayat 28G ayat (1) “UUD 1945”. Secara adanya rasa aman tersebut maka para pihak bisa menyepakati secara ikhlas dalam melaksanakan bentuk

Sebaliknya, bila dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice ada tekanan serta ancaman, maka para pihak tidak akan bisa mencapai kesepakatan secara sukarela. Dengan tidak adanya kesepakatan secara sukarela, maka harmonisasi hubungan seperti sebelum terjadi nya kejahatan sulit untuk bisa direalisasikan sebagaimana mestinya. Kemudian hak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus guna mencapai kesamaan serta keadilan dalam ayat 28H ayat (2) UUD 1945, hak untuk terbebas dari tindakan membedakan serta hak untuk memperoleh sebuah perlindungan dari perlakuan membedakan ada dalam pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Hak prinsip tersebut juga sejalan dengan pokok-pokok restorative justice yang salah satunya ialah pokok non diskriminasi.<sup>2</sup>

Pada penyelesaian perkara dengan mengenakan pendekatan *restorative justice*, ada keharusan untuk memerhatikan pihak-pihak yang memiliki kondisi khusus, seperti perempuan, lanjut usia, anak-anak, serta orang cacat. Para aspek tersebut harus diberi perlakuan khusus agar bisa memiliki kedudukan yang sama dengan pihak lain dalam melakukan negosiasi. Secara adanya kesetaraan, masing-masing pihak bisa mengutarakan kepentingannya secara baik sehingga kesepakatan bersama bisa di capai dengan penuh kerelaan dari para pihak yang terlibat sengketa, dengan kerelaan dari para aspek, maka pelaksanaan kesepakatan dalam rangka menyelesaikan masalah bisa diwujudkan secara baik.

Selanjutnya *restorative justice* jika dilihat dari aspek budaya masyarakat, pada hakikatnya akar budaya penduduk Indonesia masih berfokus ke budaya kekeluargaan yang memprioritaskan prinsip musyawarah mufakat demi merampungkan sebuah sengketa dalam sistem sosialnya. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal fungsionalisasi institusi masyarakat sebagai elemen dari proses yang dipilih guna menyelesaikan sebuah problem/masalah, termasuk

[illegible]



Pelaku diharapkan bisa tersentuh hatinya serta introspeksi, menyadari kekeliruan serta menerima tugas/kewajiban sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilaksanakan secara sadar. Proses percakapan antara pelaku kejahatan serta korban kejahatan ialah modal dasar di bagian terpenting dari penerapan keadilan restoratif. Dari proses percakapan ini pula warga bisa ikut serta dalam membuktikan data persetujuan serta mengawasi pelaksanaannya.

Negara Indonesia bukanlah negara agama. Artinya, negara Indonesia tidak menjadi kan salah satu agama sebagai dasar negara. Namun dengan demikian masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang anti agama, tetapi justru sebaliknya bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang religius. Bahkan sila pertama dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dengan jelas membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”.



Sementara itu dalam tataran aplikatif, pendekatan *restorative justice* dalam ajaran Agama Islam dalam konsep pembayaran diyat yaitu pembayaran denda. Walaupun dalam terminology secara harfiah berarti pembayaran denda, namun pada hakikatnya di dalam konsep ini juga mengandung konsep “pemaafan serta pengampunan”. Konsep diyat dalam ajaran Islam bukan hanya dilakukan terhadap tindak hukuman ringan (kecil), tetapi juga bisa dilakukan terhadap tindak hukuman berat, seperti penganiayaan serta pembunuhan.

Dalam ajaran Islam dikenal terminologi *Qishash*, yaitu suatu hukum yang menentukan pembalasan yang sama pada pelakunya. Siapa yang membunuh, maka dia harus dibunuh, orang yang memotong tangan orang lain tangannya harus dipotong, orang yang memotong telinga orang lain hukuman bagi pelakunya adalah telinganya dipotong, serta seterusnya. Namun demikian, hukuman tersebut bisa ditiadakan bila korban ataupun ahli warisnya memberikan pengampunan. Biasanya pengampunan tersebut diberikan oleh korban bila pelaku bersedia membayar denda (diyat) sesuai permintaan korban. Tetapi ada juga permintaan tersebut dan berikan tanpa adanya denda sedikitpun.

[illegible]

keluarganya tersebut bukan hanya bisa dilakukan sebelum putusan pengadilan tetapi juga bisa dilakukan sesuai ada putusan, sepanjang putusan tersebut belum dilaksanakan.<sup>3</sup>

Islam sebagai ajaran agama bisa memberikan jalan keluar bagi setiap problem/masalah yang ada serta terjadi pada kapan saja, keadaan pada setiap perkembangan zaman. Dimana konsep *Maqasid Shari'ah* menekankan bahwa Islam ada demi menciptakan serta merawat maslahat umat manusia serta menolak kesengsaraan. Melalui kemungkinan para peneliti maqasid masa kini, tepatnya Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, prospek maqasid al-shari'ah Ibn' Ashur, ada point bahwa penilaian pencipta adalah rencana maqasid al-shari'ah, secara jangkauan luas. Bagian dari kelengkapan maqasid al-shari'ah baru terbentuk pada zaman Ibn 'Ashur. Urutan maqasid al-shari'ah Ibn 'Ashur ada dua bagian, khususnya maqasid al-ammah serta al-khassah.

Dari sisi inklusi serta keberlakuan, maqasid al'ammah memiliki ruang lingkup legitimasi yang umum, yang tidak hanya untuk membantu umat Islam tetapi juga berlaku untuk semua masyarakat. Syari'at Islam dalam pandangan Ibnu 'Asyur memiliki sifat-sifat yang umum serta bisa di akui oleh semua orang, membangun kaidah kehidupan yang bergantung pada substansi syari'at Islami dalam segala jenis kerangka serta kerangka kehidupan masyarakat pada muka bumi. Rencana kelengkapan syariat Islam Ibnu 'Asyur dicirikan ke arah jalan yang akan terpenuhi melalui penggunaan syar'at Islam, khususnya pemenuhan kebenaran serta keunggulan eksistensi manusia pada setiap kondisi serta tempat. Untuk situasi ini sesuai gagasan Restorative equity yang juga menjamin keuntungan seluruh umat manusia, memberikan kelonggaran serta kelegaan kepada individu sambil tetap memegang teguh standard untuk tidak menjerat hukum tanpa mengganggu serta menyulitkan para pengikutnya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 239.

<sup>4</sup> Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-shariah al-Islamiyyah* (Tunis: al-Shirkah al- Tuniziyyah li al-tawzi’, t.th), 89.

1. masalah ditinjau segi pengaruhnya untuk kokohnya umat, jika dilihat dari segi ini konsep *restorative justice* masuk dalam masalah al hajiyyat yakni masalah yang di perlukan oleh umat yakni kebutuhan demi melancarkan serta menaikkan segala hal yang bisa melahirkan kesulitan, dalam satu keadaan tidak mengancam eksistensi kelima pokok (*al-umur al khamisah*), namun jika ditinggalkan hanya akan mengakibatkan kesulitan . Hal ini sesuai dengan konsep *restorative justice* dimana dalam pelaksanaannya akan memberikan hak korban yang di inginkannya serta juga meringankan hukuman bagi pelaku melalui percakapan langsung (mediasi), sehingga timbul suatu perdamaian di mana pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya serta korban bisa memaafkan. Dalam konsep *restorative justice* disini keberadaannya sangat diperlukan demi memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

2. Tinjauan segi hubungannya dengan umat, golongan, ataupun perorangan, maslahat ini terbagi menjadi dua yakni *maslahat al kulliyah*, serta *maslahat juz'iyah*. *Maslahat al kulliyah* adalah maslahat yang kembali kepada umat manusia secara umum. Contoh *maslahat al kulliyah* seperti menjaga suatu kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, secara *daruriyat*, *hajiyyat*

[illegible]

3. Tinjauan segi terealisasinya suatu keperluan ataupun tercegahnya keburukan.
  - a. *Maslahat qat'iyah*,

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

- b. *Maslahat Dzanniyah,*

Akhirnya pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam peraturan Jaksa no.15 tahun 2020 bisa dinilai berdasarkan *maqasid al-shariah* Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur yakni “nilai-nilai serta pokok-pokok dasar yang melandasi hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter-karakter yang mencirikan keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan

kemaslahatan serta kebaikan dalam kehidupan umat manusia di setiap zaman dan tempat”. Ada dua strategi untuk melaksanakan syari'at, yaitu satu dengan cara menyiksa dan memberi hukuman yang berat serta kemudian menawarkan bimbingan/arahan, yang kedua membuatnya lebih sederhana, menghargai, dan lemah lembut dengan penuh kasih sayang.

Strategi utama di sini terhalang oleh berbagai strategi, antara lain melanggar hukum, mengabaikan dengan cara yang merugikan, membuka jalan kebaikan, serta menawarkan kekuasaan kepada penguasa. Sedangkan strategi selanjutnya di sini dibatasi dengan mendorong hukum syari'at, khususnya dengan mengarahkan hukum dari yang sulit ke sederhana ataupun dari sulit ke halus, dengan tujuan untuk terciptanya situasi yang sesuai dengan harapan yang akan dicapai dari penggunaan keadilan. yakni mencegah terjadi nya pembalasan dari korban atau pun pelaku, serta bisa diselesaikan secara baik dan memberikan hak dari korban begitu juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya, sehingga tercapai suatu persetujuan serta kesepakatan di antara para pihak yakni Perdamaian”. Demikian konsep *restorative justice* dalam maqasid shari'ah di harap bisa meliputi banyak tujuan yang bersifat umum yakni mengokohkan maslahat serta menolak kesengsaraan.









## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- ‘Abdus-Salām, ‘Izzud-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin. *Al-Qawā‘id al-Kubrā: al-Mausūm biQawā‘id al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām, tahkik Naziyyah Kamāl Aḥmad dan ‘Uṣmān Jum‘ah Ḍumairiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- ‘Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭāhir Ibnu. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah*, cet. 2, tahkik Muhammad aṭ-Ṭāhir alMisāwiyy. Jordania: Dār an-Nafā‘is, 421H/2001.
- *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tunusiyyāh lin-Nasyr, 1984M.
- *Uṣūl an-Niẓām al-Ijtimā‘iy fī al-Islām*. Tunisia: asy-Syarikah at-Tūnusiyyah, t.t.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Jonadi. Ibrahim, Johnny. *Metode penelitian hukum normative dan empiris*. Depok : Prenada media grup, 2016.
- Fāsiy, ‘Allāl al-. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*, cet. 5. T.t.p.: Dār al-Mağrib al-Islāmiy, 1993.
- Ġāliyy, Balqāsīm al-. *Syaikh al-Jāmi‘ al-A‘ẓam Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr: Ḥayātuh wa Āṣāruh*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1417H/1996M.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid Al-Syari‘ah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Juwayniy, Abu al-Ma‘ālī Abdul Malik bin Abdullāh bin Yūsuf al. al-Burhān fī Uṣūl alFiqh. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418H/1997M.

- Johnstone, Gerry and Daniel W. Van Ness (eds). *Handbook of Restorative Justice*. UK: Willan Publishing, 2007.
- Mani', 'Abd al-Halim. *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir, terj Faisa Saleh Syahdianur*. Jakarta : PT. Karya Grafindo, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mulia, Musda. *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni, 1996.
- Syāṭibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Ghirmāṭi Abu Ishāq asy-  
. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1423H/ 2002M
- Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok : Rajawali, 2017.
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung, 2011.

## Skripsi, Makalah, Jurnal, Artikel

- Abdullah, Amin. “*Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan*”. Jurnal Sosiologi Reflektif, 2009.
- Andi Hamzah, *Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*”, Makalah disampaikan pada seminar nasional, diakses pada tanggal 4 desember 2020
- Barda Nawawi Arief, “*Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*”, <http://nardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 4 desember 2020
- <http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-supremasi-hukum-dan.html>, diakses tanggal 5 Desember 2020.



